Halaman

KPK Buka Peluang Hadirkan Rektor USU.....

Dari Halaman 1

kan surat dengan alasan adanya pemilihan rektor di USU.

"Nanti kalau tidak sempat di proses penyidikan, permintaan keterangan apabila keterangan yang diinginkan dari kedua orang ini belum ada, itu bisa nanti dihadirkan di persidangan," kata Asep di kantornya, Jakarta, Senin (10/11).

Kasus korupsi proyek jalan di Sumut terungkap setelah KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) di Tapanuli Selatan pada Juni 2025.

Saat itu penyidik mengamankan sejumlah pihak termasuk eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting yang tak lain orang terdekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu-

KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting, eks Kepala UPTD Dinas PUPR Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilavah I Sumatera Utara, Helivanto.

Lalu kontraktor dari pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang, dan Direktur Utama PT Rona Mora, Reyhan Dulsani

Kasus tersebut pun bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Penuntut dari KPK mendakwa Akhirun Piliang (terdakwa I) dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (terdakwa II) memberikan uang berjumlah Rp4.054.000.000 kepada sejumlah pejabat antara lain Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut.

Uang tersebut diberikan agar perusahaan PT Dalihan Natolu Grup memenangi paket proyek jalan melalui sistem e-katalog di Dinas PUPR Sumut.(cnni/js)

Komisi III DPR Usul Bentuk TGPF

Dari Halaman 1

Menurut Abdullah, pembentukan TGPF itu penting untuk menjawab berbagai dugaan kejanggalan yang muncul dalam temuan itu seperti yang disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

"Saya mengusulkan dibentuknya TGPF Kerangka Farhan dan Reno ini, namun didahului berkomunikasi dengan keluarga korban tersebut," kata Abdullah saat dihubungi, Selasa (12/11).

Sebelumnya, KontraS dalam pernyataannya mengungkap sejumlah kejanggalan terkait temuan kerangka hingga diumumkannya hasil tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat (7/11) lalu.

Beberapa di antaranya adalah ktivitas Puslabfor Bareskrim Polri pada 19 Oktober yang memeriksa TKP Gedung ACC untuk mencari tahu penyebab kebakaran berselang hari pascakebakaran bangunan tak jauh dari Mako Brimob Kwitang itu. Saat petugas melakukan pemeriksaan TKP kala itu tak ditemukan kerangka manusia di sana.

Selain itu, polisi sebelumnya juga mengaku sudah memastikan tak ada korban di lokasi pembakaran sejumlah fasilitas umum yang ada Jakarta Pusat yakni di Kwitang, Senen, dan Salemba

Namun, usai temuan kerangka pada 30 Okto-

ber, RS Polri justru menyimpulkan dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung AAC Kwitang, identik dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua korban yang dinyatakan hilang saat demo.

Menurut Abdullah, kejanggalan itu harus dijawab dengan bukti dan data yang valid.

"Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan strategis yang mesti dijawab dengan bukti data yang valid," katanya.

Oleh karena itu, dia mendorong agar TGPF melibatkan sejumlah unsur lembaga pemerintah dan sipil mulai dari Komnas HAM, LPSK, organisasi nonpemerintah terkait seperti KontraS dan Amnesty International Indonesia, akademisi, hingga lembaga forensik independen dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Abdullah, pembentukan TGPF bukan wujud ketidakpercayaan terhadap Polri, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penegakkan hukum.

"Kasus ini menyangkut hak hidup dua warga negara, dan negara berkewajiban menjelaskan kebenarannya. Jika tidak, hukum akan kehilangan legitimasi dan tidak menghasilkan keadilan yang nyata," katanya.

Sebelumnya, dua kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dikenali bentuknya di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis

(30/10). Gedung itu berdekatan dengan markas Brimob itu sempat terbakar saat demonstrasi akhir Agustus lalu.

Temuan dua kerangka tersebut lalu dilaporkan kepolisian. Menindaklanjuti itu, polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Temuan kerangka manusia tersebut lalu dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan

lalu mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11).

Hasilnya, tes DNA terhadap dua kerangka itu identik dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Reno dan Farhan adalah dua korban yang dinyatakan hilang pascagelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.

Terkait sejumlah kekerasan dan kericuhan yang terjadi selama gelombang demo dan pascademo Agustus lalu di seluruh Indonesia, pemerintah memutuskan tak akan membentuk TGPF terkait.

Di sisi lain, lembaga-lembaga negara yang independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga LPSK menyatakan membentuk tim independen pencari fakta gabungan tersendiri terkait kekerasan dan kericunhan yang berkesinambungan dengan gelombang demo akhir Agustus lalu.(cnni/js)

KPK Bantah Geledah Mobil Plt Gubernur dan

Dari Halaman 1

tertulis, Selasa (11/11).

Selain menggeledah kantor gubernur, Budi mengatakan penyidik juga memintai keterangan yang diperlukan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Protokol Riau.

Namun, hingga berita ini ditulis, Budi belum memberi informasi perihal materi yang didalami penyidik kepada kedua orang tersebut.

"Penggeledahan kali ini berfokus di kantor gubernur, serta permintaan keterangan yang diperlukan penyidik terhadap Sekda dan Kabag Protokol," imbuhnya.

Adapun penyidik menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi saat menggeledah Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11).

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau," kata Budi.

Budi menerangkan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik sebagai upaya paksa dalam rangkaian kegiatan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Provinsi

Para tersangka itu adalah Gubernur Riau

Abdul Wahid dan tenaga ahlinya, Dani M Nursalam.

Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M Arief Setiawan.

Para tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 23 November

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 avat 1 ke-1 KUHP.

Penanganan kasus ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal November lalu.(cnni/js)

Pemerintah Utus Tim ke China

Dari Halaman 1

utang kereta cepat.

Sang Bendahara Negara mengatakan pemerintah masih mendiskusikan rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut.

"Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap membayar utang proyek

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo meminta seluruh pihak untuk tak hanya melihat persoalan itu dari besaran anggarannya, tapi juga manfaatnya bagi publik.

"Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Di kesempatan yang sama, Prabowo juga menyebut pemerintah bakal menggunakan uang negara hasil sitaan dari para koruptor untuk

membayar utang Whoosh. "Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," ujar Prabowo.(cnni/js)

Bulog akan Tampung Hasil Panen Petani

Dari Halaman 1

nyerapan gabah dan jagung selama ini terletak pada terbatasnya kapasitas gudang Bulog yang justru berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, produksi beras nasional meningkat signifikan dari 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton, atau naik lebih dari 13 persen.

"Pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat atau petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap hasil panen," ujar Zulhas dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Ia menambahkan pembangunan 100 gudang baru ini akan menjadi jawaban atas keluhan petani di berbagai daerah yang kerap kesulitan

menyalurkan hasil panennya.

Rencana tersebut tengah menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar penugasan kepada Bulog.

"Menurut Undang-Undang BUMN yang baru, setiap penugasan harus ada SKB dan Inpres atau Perpres. Ini sedang kita urus agar segera bisa dijalankan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan proyek pembangunan 100 gudang akan diprioritaskan di kabupaten dan kota yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) seperti Nias Selatan dan Mo-

Langkah ini dilakukan agar efisiensi biaya distribusi meningkat dan stok pangan tetap aman saat akses transportasi terganggu akibat cuaca.

Bulog juga akan menyesuaikan desain gudang

dengan karakteristik wilayah. Di sentra produksi pangan, gudang akan dilengkapi dengan Rice Milling Unit (RMU), dryer, dan fasilitas pascapanen lainnya.

Sementara di daerah kepulauan yang tidak memiliki lahan pertanian luas, gudang hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara.

"Kalau wilayahnya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU dan dryer. Tapi kalau di kepulauan yang tidak punya sentra pangan, hanya gudang saja," ujar Rizal.

Setiap gudang nantinya memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 ton hingga 7.000 ton, tergantung pada luas lahan dan potensi pertanian

di daerah tersebut. Bulog juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan lokasi prioritas agar pembangunan selaras dengan peta produksi pangan nasional. (cnni/js)

SBY Peringatkan Potensi Perang Dunia III

Dari Halaman 1

happen (kapan saja bisa terjadi)," kata SBY di hadapan civitas akademika ITS.

SBY menilai situasi global saat ini diwarnai nasionalisme ekstrem dan tindakan sepihak dari negaranegara besar. Ia menyebut rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia telah menciptakan ketegangan baru di berbagai kawasan dunia.

"Geopolitik of rivalry bersaing Amerika, Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain. Akibatnya perang terjadi, makin sering terjadi. Perlombaan

persenjataan. Padahal sudah terlalu banyak senjata pemusnah massal," ucapnya

"Dulu Perang Dunia Kedua hanya dua bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang thousands of Hulu Ledak. Bagaimana nasib bumi kita?," tambahnya.

Menurut SBY, melemahnya kerja sama global dan meningkatnya egoisme negara besar memperburuk stabilitas internasional. Ia menilai dunia tengah mengalami kemunduran dalam kolaborasi multilateral maupun regional.

"Setiap negara mengutamakan kepentingan masing-masing. Namanya G-zero, every country for itself," kata SBY.

Namun SBY tetap percaya perang dunia bisa dicegah. Ia pun menyerukan agar para pemimpin dunia kembali mengedepankan diplomasi dan kerjasama, bukan konfrontasi.

"Tetapi saya termasuk barisan yang [yakin] perang dunia ketiga yang sangat menakutkan tetap bisa dicegah. Can be prevented, can be avoided. If there is a will, there's a way (Bisa dicegah, bisa dihindari. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan). Tergantung para pemimpin dunia sekarang ini," pungkasnya.(cnni/js)

Kepercayaan yang Tumbang di Meja Bank

Dari Halaman 1

ketika yang mengalir adalah kredit fiktif, maka bukan pertumbuhan yang datang melainkan kecurigaan.

Mungkin kita perlu bertanya lebih dalam, bagaimana pola rekrutmen di bank ini? Siapa yang memilih direksi, siapa yang menentukan pejabat, dan apa yang sesungguhnya jadi ukuran? Apakah hanya kedekatan, bukan kejujuran? Apakah jabatan di sana sudah menjadi hadiah politik?

Jika dibiarkan, bank ini bukan hanya akan kehilangan nasabah. Ia akan kehilangan makna

keberadaannya. Sebab bank tanpa kepercayaan hanyalah gedung berpendingin, dengan pegawai yang menghitung angka tanpa ruh.

Mungkin sudah saatnya Bank Sumut menata ulang dirinya. Menyapu kotoran di dalam rumah, bukan menutupi dengan karpet baru.

Dalam Islam, amanah adalah ujian. Siapa yang mengkhianatinya, tak hanya rugi di dunia tapi juga kehilangan harga diri di sisi Tuhan.

Semoga dari reruntuhan kepercayaan ini, masih tersisa satu hal yang bisa tumbuh kembali, yakni kejujuran.(*)

126 Ribu Pekerja

Dari Halaman 1

tetapi baru dilaporkan ke KSPN pada 2024. Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja, katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Ia mengatakan, dari total 126 ribu pekerja korban PHK, sebanyak 99.666 atau 79 persen berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya, berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, dan varian kertas.

PHK, sambungnya, berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 perusahaan non TPT. Dari 59 perusahaan TPT, 3 perusahaan berorientasi penuh pada ekspor.

'Sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," katanya.

Ristadi mengatakan, untuk sebaran wilayahnya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38 persen). Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten sebanyak 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara sebanyak 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Ia menjabarkan ada enam penyebab PHK. Pertama, berkurangnya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi atau pengurangan pekerja. Kedua, pemesanan berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total pabrik.

"Ketiga, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang sebabkan cost product tidak bisa bersaing," katanya.

Keempat, gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan. Kelima, perusahaan yang punya merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual karena kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Terakhir, relokasi perusahaan yang berorientasi

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merinci 3 sektor penyumbang kasus PHK terbanyak di Indone-

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.

Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.(cnni/js)

Hidayah

Akademisi di Pusaran Korupsi Jalan

Dari Halaman 1

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Tapanuli Selatan pada Juni 2025. Dari hasil penyidikan, terungkap adanya praktik suap senilai Rp4,05 miliar untuk memenangkan paket proyek jalan melalui sistem e-katalog di Dinas PUPR Sumut. KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting orang dekat Gubernur Bobby Nasution dan beberapa kontraktor swasta. Kini, lembaga antirasuah mempertimbangkan memanggil Rektor USU yang sebelumnya mangkir dari panggilan penvidikan.

Ketika seorang rektor dipanggil KPK dalam kasus korupsi proyek publik, yang terguncang bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga integritas universitas sebagai lembaga moral dan intelektual. Akademisi idealnya menjadi penjaga nilai kebenaran (guardian of truth), bukan bagian dari jejaring kekuasaan yang beraroma rente. Namun, kenyataannya, sebagian perguruan tinggi negeri kini semakin dekat dengan kekuasaan daerah baik karena kepentingan politik, dukungan anggaran, maupun akses proyek pembangunan.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran orientasi akademik dari etika ke pragmatisme. Di tengah kompetisi sumber daya dan tekanan birokrasi, sebagian pejabat kampus tergoda memanfaatkan relasi politik demi keuntungan institusi atau pribadi. Padahal, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa integritas menjelma menjadi alat pembenaran kekuasaan bukan pencerahan bagi masyarakat.

Kasus korupsi jalan bukan sekadar soal aspal yang dikurangi volumenya atau uang proyek yang dipotong, tetapi cerminan jalan moral bangsa yang berlubang. Ketika akademisi ikut bermain di proyek-proyek publik, batas antara ruang ilmu dan ruang kekuasaan menjadi kabur. Kampus kehilangan jarak kritisnya, dan dosen kehilangan perannya sebagai pengawal akal sehat publik. Jalan pikiran bangsa menjadi bengkok sebelum jalan aspalnya rusak.

Kini, penting bagi dunia pendidikan untuk melakukan introspeksi institusional. Rektor dan dosen bukan sekadar manajer kampus, tetapi pemimpin moral. Integritas harus menjadi kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dalam setiap kebijakan dan teladan. Dunia akademik mesti kembali ke fungsi asalnya: menegakkan kebenaran, mengoreksi kekuasaan, dan menanamkan etika publik. Tanpa itu, universitas hanya akan menjadi pabrik gelar bukan pabrik akhlak.

Di tengah jalan-jalan rusak yang menunggu diperbaiki, bangsa ini lebih membutuhkan jalan pikiran yang lurus dan bersih. KPK mungkin bisa menambal korupsi dengan vonis, tetapi hanya kampus yang bisa memperbaiki karakter bangsa dengan ilmu dan teladan. Jika akademisi ikut korup, kepada siapa lagi rakyat belajar tentang kejujuran?